



Pengaruh Pajak Daerah, Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota

Rangga Pangestu

Fakultas Ekonomi, Akuntansi, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Medan

Jl. Garu II No. 93, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Email: zanarda4326@gmail.com

Email Penulis Korespondensi: zanarda4326@gmail.com

Submitted: 23/12/2022; Accepted: 28/02/2023; Published: 28/02/2023

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, dana perimbangan, pendapatan asli daerah, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten/Kota provinsi Sumatera Utara. Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif menggunakan data kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 33 kabupaten di Sumatera Utara dan Sampel Kabupaten Dalam Angka pada Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2020 yang terdapat di Badan Pusat statistik. Pengumpulan data dalam hal ini, peneliti memperoleh data-data penelitian melalui Kabupaten Dalam Angka Provinsi Sumatera Utara dimana data tersebut tersedia di Badan Pusat Statistik. Hasil analisis menunjukkan bahwa pajak daerah dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. sebaliknya dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Kata kunci: Pajak Daerah; Dana Perimbangan; Pendapatan Asli Daerah; Belanja Modal; Kinerja Keuangan

Abstract—This study aims to determine the effect of local taxes, balance funds, local revenue, and capital expenditure on the financial performance of the district/city government of North Sumatra province. This research was conducted in the district/city of North Sumatra province. This type of research in this study uses an associative approach using quantitative data. The population in this study are 33 districts in North Sumatra and the Sample Districts in Figures in North Sumatra Province for 2018-2020 are available at the Central Statistics Agency. Data collection in this case, the researcher obtained research data from the Regency in Figures of North Sumatra Province where the data is available at the Central Bureau of Statistics. The results of the analysis show that local taxes and capital expenditures have no effect on financial performance. conversely, balancing funds have a negative effect on financial performance, and local revenue has a positive effect on financial performance.

Keyword: Local Tax; Balancing Fund; Locally-generated Revenue; Capital Expenditures; Financial performance

1. PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 telah berdampak luas pada orang-orang di semua wilayah yang terkena dampak, termasuk Indonesia. Dengan munculnya Covid-19, pemerintah Indonesia mulai menekankan bahwa masyarakat diimbau untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah untuk menghindari penyebaran Covid-19. Berbeda dengan negara lain yang menerapkan lockdown, pemerintah Indonesia diharapkan dapat memitigasi dampak krisis ekonomi melalui *social distancing* dan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar (Nasution et al., 2020). Namun, kebijakan tersebut menghambat kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga ruang geraknya terbatas. Tak perlu dikatakan, jumlah karyawan yang diberhentikan atau diberhentikan oleh perusahaan karena alasan kompensasi terus bertambah (Honoatubun, 2020).

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan sebuah indikator yang ada pada daerah untuk dapat menelusuri serta mengurus segala aset daerah dalam melaksanakan sistem pemerintahan, melayani masyarakat, dan pembangunan daerah (Verawaty. Ade et al., 2020). Kinerja keuangan pemerintah merupakan upaya untuk mengukur hasil yang dicapai oleh pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan melalui keuangan pemerintah daerah itu sendiri. Penilaian kapasitas keuangan dapat menjadi indikator bagi pemerintah dalam menangani semua bisnis pemerintah dengan lebih baik. (I. P. Sari & Agusti, 2016)

Pada kinerja keuangan pemerintah, masyarakat dapat mengetahui bagaimana pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan daerahnya, dan apakah dapat dinilai baik atau buruk dalam menjalankan urusan daerah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Maka dari itu, kinerja keuangan pemerintah diharuskan untuk diukur agar dapat melihat sejauh mana kemajuan serta pencapaian pemerintah dalam melaksanakan dan menjalankan tugasnya. Menurut (Harahap, 2020), kinerja keuangan pemerintah yang berhasil adalah pemerintahan yang efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel yang mengelola keuangannya dengan baik, mengikuti peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. (Saragih, 2020)

Menurut Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah yang diterima digunakan untuk membiayai kegiatan dan proyek masyarakat yang berdampak positif bagi perkembangan ekonomi daerah. (Alfarisi, 2015) Pajak daerah yang diterima membiayai setiap kegiatan atau pekerjaan untuk kepentingan daerah, mereka memiliki efek positif pada perkembangan ekonomi pembangunan daerah. Tingginya pendapatan pajak daerah, pemerintah daerah akan semakin mudah dalam melakukan



pembangunan infrastruktur untuk masyarakat, pelayanan publik yang memadai, serta dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah dari APBN dan membantu penyelenggaraan instansi pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pemberian otonomi daerah, terutama peningkatan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan umum. Secara umum, Dana Perimbangan menyumbang sebagian besar dana kegiatan Pemerintah Daerah, dan tujuan utamanya adalah untuk mengisi kesenjangan anggaran antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan kesenjangan anggaran, memperbaiki sistem perpajakan, dan ketidakefisienan pajak. (Budianto & Alexander, 2016)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang berbasis potensi daerah yang dapat digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi faktor yang sangat penting, dimana PAD yang menjadi sumber dana dari daerah tersebut. Sumber pendapatan negara yang dapat diandalkan untuk melaksanakan tugas negara dan pembangunan. Efisiensi PAD dari daerah berpengaruh positif terhadap efisiensi daerah dalam alokasi anggaran dalam APBD. (Juwita, 2017)

Belanja modal digunakan sebagai alokasi untuk perencanaan keuangan jangka panjang dan pemeliharaan aset, yang kemudian digunakan untuk sarana dan prasarana daerah. Melihat ke belakang, ada beberapa daerah di mana biaya operasional melebihi belanja modal. Hal ini berdampak negatif bagi masyarakat karena belum optimalnya pembangunan infrastruktur publik. Menurut (Lathifa & Haryanto, 2019), pemerintah daerah kurang memperhatikan realisasi potensi pendapatan daerahnya, yang dapat menjadi salah satu faktor penyebabnya.

Di Sumatera Utara sendiri, fenomena kinerja keuangan masih mencerminkan bahwa rasio efisiensi masih sangat rendah karena ketidakmampuan pemerintah kabupaten/kota provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah menyebabkan pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara bergantung dengan pemerintah pusat. Pada tahun 2018 kinerja keuangan rasio efisiensi meningkat sebesar 99,88. Namun pada tahun 2019 kinerja keuangan di Sumatera Utara memiliki rasio efisiensi yang menurun menjadi 92,85 dan mulai meningkat pada tahun 2020 menjadi 97,28 dikarenakan pada tahun 2019 hingga 2020 di Indonesia khususnya di pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan ekonomi yang disebabkan oleh adanya pandemi virus Covid-19. Dapat dilihat bahwa kinerja keuangan dari tahun ketahun tidak stabil cenderung menurun. Hal ini berarti Pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara masih kurang mampu untuk mengelolakan Pendapatan Asli Daerah sehingga menyebabkan Pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara bergantung dengan pemerintah pusat. Dapat terlihat pergerakan kinerja keuangan yang bergerak fluktuatif sehingga dengan uraian berikut beberapa penelitian terdahulu adanya pengaruh antara pajak daerah terhadap kinerja keuangan adalah menurut penelitian (Wiguna & Jati, 2019) pajak daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan Daerah. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian (Fitriyanti, 2022) hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

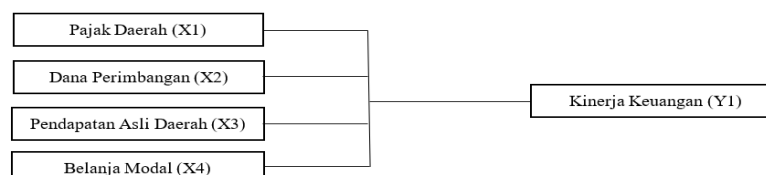
Peneliti lainnya juga membuktikan adanya pengaruh secara signifikan antara dana perimbangan terhadap kinerja keuangan adalah penelitian (Putri & Darmayanti, 2019) menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya perolehan penerimaan Dana Perimbangan akan diikuti dengan penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah. Begitu pula hasil penelitian (Heryanti et al., 2019) Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan yang berarti kenaikan dana perimbangan akan menurunkan kinerja keuangan.

Menurut penelitian (Nauw, 2021) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan dan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Begitu pula hasil penelitian (Lathifa & Haryanto, 2019) yang mendapatkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Menurut penelitian (N. M. D. P. Sari & Mustanda, 2019) mengatakan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi belanja modal yang dilakukan pemerintah maka semakin tinggi pula kinerja keuangan pemerintah daerah. Begitu pula hasil penelitian (Lathifa & Haryanto, 2019) yang mendapatkan hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Kerangka Dasar Penelitian

Model kerangka pemikiran pada penelitian ini digambarkan pada gambar di bawah ini sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual



Berdasarkan penjelasan tinjauan pustaka, peneliti membentuk kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan secara simultan antara variabel independen dan dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Belanja Modal, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan

Menurut (Sugiyono, 2017) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan hanya didasarkan pada teori relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H1: Pajak daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H2: Dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H3: Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H4: Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Jenis penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih. Penelitian dengan metode asosiatif menurut (Sugiyono, 2017) adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Dalam penelitian asosiatif ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menganalisis Pengaruh Pajak Daerah, Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Sumatera Utara. Penelitian ini merupakan penelitian dengan data kuantitatif. Pada penelitian ini, peneliti akan menguji hubungan variabel antara variabel independen yaitu Pajak Daerah, Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara.

Untuk setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka akan diuraikan variabel beserta cara pengukurannya, yaitu Dana Perimbangan, Pajak Daerah, Belanja Modal, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Pajak daerah merupakan pungutan yang berasal dari tangan masyarakat kepada daerah berdasarkan dengan ketentuan undang undang yang sifatnya memaksa dan terutang oleh wajib pajak dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, yang kemudian hasilnya digunakan untuk mendanai pengeluaran daerah dalam rangka pembangunan pemerintahan Pengukuran variabel pajak daerah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Total PAD}} \times 100 \quad (1)$$

Dana perimbangan adalah sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah. Pengukuran variabel dana perimbangan sebagai berikut:

$$\text{Ln. Total Realisasi Dana Perimbangan} \quad (2)$$

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengukuran variabel PAD sebagai berikut:

$$\text{Ln. Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah} \quad (3)$$

Belanja Modal merupakan belanja yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil. Infrastruktur yang dibiayai dengan belanja modal nantinya akan mempercepat roda perekonomian sehingga perekonomian dapat berjalan dengan lancar dikarenakan distribusi barang dan jasa berjalan dengan lebih efisien dan efektif. Pengukuran variabel belanja modal sebagai berikut:

$$\text{Ln Total Realisasi Belanja Modal} \quad (4)$$

Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi, maka proksi pengukuran kinerja pemerintah daerah untuk kabupaten dan kota digunakan dengan rumus efisiensi dan diukur dengan rasio output dengan input (Mardiasmo, 2018). Pengukuran variabel rasio efisiensi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi BD}}{\text{Realisasi PD}} \times 100 \quad (5)$$

Penelitian ini menggunakan seluruh kabupaten yang berada di Sumatera Utara dengan jumlah sebanyak 33 kabupaten. Sebanyak 33 Kabupaten Dalam Angka yang tersedia secara lengkap yang berasal dari Badan Pusat Statistik Sumatera Utara selama periode 2018-2020. Sehingga jumlah sampel data penelitian ini selama tahun 2018-2020 yaitu sebanyak 99 data pada Kabupaten Dalam Angka. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan program SPSS (*Statistical Package for Social Science*) versi 25. Namun sebelumnya peneliti melakukan analisis linear berganda terlebih dahulu yang dilakukan dalam uji statistik deskriptif, dan uji asumsi klasik. Penelitian ini menggunakan pengujian analisis statistik deskriptif dan dilanjutkan dengan uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas). Pada ujia Hipotesis, penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap yaitu



Regresi Berganda, Uji Koefisien Determinasi (Uji R²), Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F), dan Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, berikut data disimpan dalam tabel dengan program SPSS versi 25. Tahap selanjutnya pengolahan data hasil penelitian disajikan sebagai berikut:

3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

	N	Descriptive Statistics			
		Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	99	5.65	120.62	35.1597	21.30957
Dana Perimbangan	99	26.70	34.25	27.6359	1.16552
Pendapatan Asli Daerah	99	23.53	32.55	25.3930	1.42330
Belanja Modal	99	19.62	33.29	26.6170	2.53824
Kinerja Keuangan	99	33.06	113.33	95.3567	8.52412
Valid N (listwise)	99				

Tabel 1. menunjukkan nilai minimum sebesar 5,65. Hal ini menunjukkan bahwa nilai pajak daerah terkecil yang terdapat pada pajak nilai tersebut yang di dapat dari Kabupaten Nias tahun 2020. Hasil untuk nilai maksimum sebesar 120,62. Hal ini menunjukkan bahwa nilai terbesar yang terdapat pada pajak daerah sebesar nilai tersebut yang didapat dari Kabupaten Toba Samosir tahun 2018. Hasil untuk nilai rata-rata (*mean*) sebesar 35.1597. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata pada aspek pajak daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar dengan standar deviasi (*standard deviation*) sebesar 21.30957.

Dana perimbangan menunjukan hasil nilai minimum sebesar 26.70. Hal ini menunjukkan bahwa nilai terkecil yang terdapat pada dana perimbangan sebesar nilai tersebut yang di dapat dari Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2020. Hasil untuk nilai maksimum sebesar 34.25. Hal ini menunjukkan bahwa nilai terbesar yang terdapat pada dana perimbangan sebesar nilai tersebut yang didapat dari Kota Binjai tahun 2018. Hasil untuk nilai rata-rata (*mean*) sebesar 27.6359. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata pada aspek dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar dengan standar deviasi (*standard deviation*) sebesar 1.16552.

Pendapatan asli daerah menunjukan hasil nilai minimum sebesar 23.53. Hal ini menunjukkan bahwa nilai terkecil yang terdapat pada pendapatan asli daerah sebesar nilai tersebut yang di dapat dari Kabupaten Nias Selatan tahun 2020. Hasil untuk nilai maksimum sebesar 32.55. Hal ini menunjukkan bahwa nilai terbesar yang terdapat pada pendapatan asli daerah sebesar nilai tersebut yang didapat dari Kota Pematang Siantar tahun 2018. Hasil untuk nilai rata-rata (*mean*) sebesar 25.3930. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata pada aspek pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar dengan standar deviasi (*standard deviation*) sebesar 1.42330.

Belanja modal menunjukan hasil nilai minimum sebesar 19.62. Hal ini menunjukkan bahwa nilai terkecil yang terdapat pada belanja modal sebesar nilai tersebut yang di dapat dari Kabupaten Nias Barat tahun 2020. Hasil untuk nilai maksimum sebesar 33.29. Hal ini menunjukkan bahwa nilai terbesar yang terdapat pada belanja modal sebesar nilai tersebut yang didapat dari Kota Pematang Siantar tahun 2018. Hasil untuk nilai rata-rata (*mean*) sebesar 26.6170. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata pada aspek belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar dengan standar deviasi (*standard deviation*) sebesar 2.53824.

Kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukan hasil bahwa nilai minimum sebesar 33.06. Hal ini menunjukkan bahwa nilai terkecil yang terdapat pada Kota Gunung Sitoli tahun 2020. Hasil untuk nilai maksimum sebesar 113.33. Hal ini menunjukkan bahwa nilai terbesar yang terdapat pada Kabupaten Toba Samosir tahun 2020. Hasil untuk nilai rata-rata (*mean*) sebesar 95.3567, hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar tersebut dengan standar deviasi (*standard deviation*) sebesar 8.52412.

3.1 Analisis Statistik Deskriptif

3.1.1 Uji Normalitas

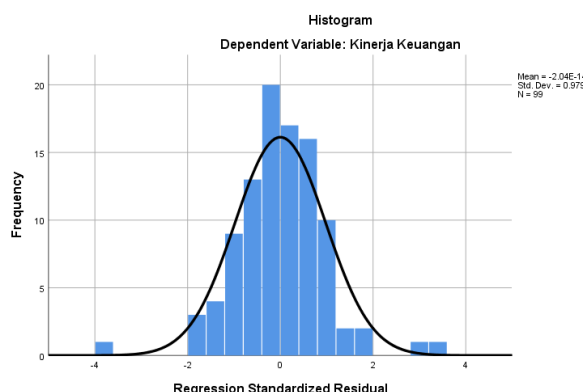
Tabel 2. Hasil Uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* (K-S)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
Unstandardized Residual	
N	99
Normal Parameters ^{a,b} Mean	.0000000
Std. Deviation	.05689730



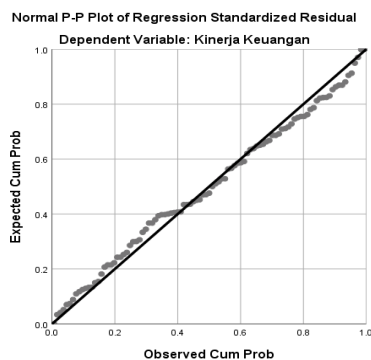
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
Unstandardized Residual		
Most Extreme Differences	Absolute	.061
	Positive	.055
	Negative	-.061
Test Statistic		.061
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Dapat dilihat pada Tabel 2. hasil uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* (K-S) diketahui nilai *Asymp. Sig* (2-tailed) sebesar 0,200. Nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikannya yaitu sebesar 0,05. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal.



Gambar 1. Hasil Uji Grafik Histogram

Pada Gambar 1. di atas dapat dilihat bahwa grafik histogram menggambarkan bentuk yang simetris, maka grafik pada penelitian ini merupakan data yang terdistribusi normal.



Gambar 2. Hasil Uji Grafik Normal Probability (P-P) Plot

Dapat dilihat pada Gambar 2. bahwa titik-titik menyebar dan berhimpit di sekitar garis diagonal. Hal tersebut menunjukkan hasil bahwa grafik *Normal Probability* (P-P) Plot di atas data terdistribusi normal.

3.1.2 Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	4.798	.434		11.049	.000		
Pajak Daerah	-.001	.005	-.021	-.179	.858	.752	1.330
Dana Perimbangan	-.017	.018	-.118	-.914	.363	.617	1.621
Pendapatan Asli Daerah	.009	.007	.157	1.297	.198	.702	1.424



Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
Belanja Modal	.001	.007	.009	.089	.929	.922	1.085

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Dapat dilihat pada Tabel 3. hasil uji multikolinearitas pada setiap variabel bebas (independen) yang digunakan pada penelitian ini yaitu Pajak Daerah, Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal terhadap variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara menunjukkan nilai Tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas dalam kedua model regresi.

3.1.3 Uji Autokorelasi

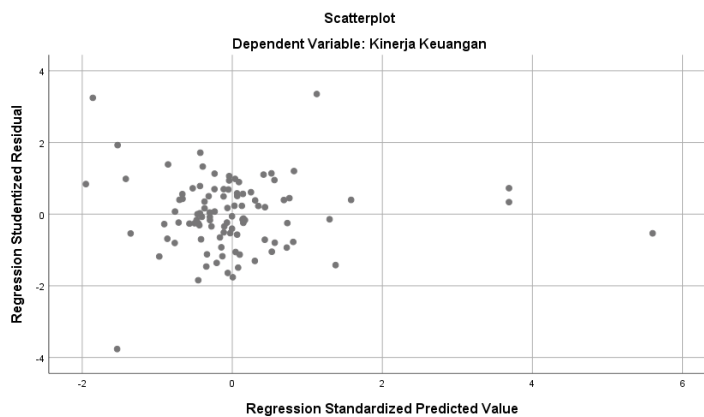
Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi Durbin Watson

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.162 ^a	.026	-.015	.05810	1.275

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan
b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Dapat dilihat pada Tabel 4. nilai uji autokorelasi dengan menggunakan Durbin Watson sebesar 1.275. Hasil tersebut dibandingkan dengan nilai tabel signifikansi sebesar 5%, dengan jumlah sampel sebanyak 99 (n=99), dan jumlah variabel independen sebanyak 4 variabel yakni Pajak Daerah, Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal (k=4). Oleh karena nilai ini lebih besar dari batas atas (DU) 1.7575 dan kurang dari 4-DU (4-1.7575=2,2425) maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

3.1.4 Uji Heteroskedastisitas



Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas Grafik Scatterplot

Dapat dilihat pada Gambar 3. hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik scatterplot dapat dilihat bahwa tidak terdapat pola yang jelas, kemudian titik-titiknya menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.2 Uji Hipotesis

3.2.1 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.634 ^a	.402	.377	.01162

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan
b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Pada Tabel 5. nilai *Adjusted R²* diperoleh sebesar 0.377. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya (independen), yakni: Pajak Daerah, Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal yang diharapkan sebesar 37,7%. Maka sisanya sebesar 62,3% ditentukan



oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. Variabel tersebut misalnya, variabel Ukuran Daerah, Belanja Daerah, dan Retribusi Daerah.

3.2.2 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Tabel 6. Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F)

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.009	4	.002	15.830	.000 ^b
	Residual	.013	94	.000		
	Total	.021	98			

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan
 b. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan

Pada Tabel 6. nilai F hitung sebesar 15.830 dengan nilai sig sebesar 0.000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi < alpha ($\alpha=0,05$). Maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara Pajak Daerah, Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

3.2.3 Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Tabel 7. Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji t)

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	4.798	.087		55.243	.000
	Pajak Daerah	-.001	.001	-.082	-.895	.373
	Dana Perimbangan	-.017	.004	-.464	-4.569	.000
	Pendapatan Asli Daerah	.009	.001	.617	6.484	.000
	Belanja Modal	.001	.001	.037	.446	.657

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil pada Tabel 7. di atas maka dapat disimpulkan regresi linear berganda sebagai berikut:

Kinerja = 4.798 – 0.01 Pajak Daerah – 0.17 Dana Perimbangan + 0,09 Pendapatan Asli Daerah + 0,001 Belanja Modal

Dari model di atas dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar 4.798 yang berarti: dengan adanya penambahan pada pajak daerah, dana perimbangan, pendapatan asli daerah, dan belanja modal, maka kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota provinsi Sumatera Utara meningkat sebesar 4.798 pada tahun 2018-2020. Nilai koefisien Pajak Daerah adalah sebesar -0.01 yang menunjukkan hasil negatif. Hasil ini menunjukkan bahwa ketika terjadi setiap penambahan 1% variabel pajak daerah dengan asumsi variabel lain tetap, maka akan menurunkan kinerja keuangan daerah sebesar 0.01 pada periode 2018-2020 dengan asumsi variabel lain dalam regresi linear berganda. Nilai koefisien Dana Perimbangan adalah sebesar -0.17 yang menunjukkan hasil negatif. Hasil ini menunjukkan bahwa ketika terjadi setiap penambahan 1% variabel dana perimbangan dengan asumsi variabel lain tetap, maka akan menurunkan kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota provinsi Sumatera Utara sebesar -0,17 pada periode 2018-2020 dengan asumsi variabel lain dalam regresi linear berganda. Nilai koefisien pendapatan asli daerah adalah sebesar 0,09 yang menunjukkan hasil positif. Hasil ini menunjukkan bahwa ketika terjadi setiap penambahan 1% variabel pendapatan asli daerah dengan asumsi variabel lain tetap, maka akan menaikkan kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota provinsi Sumatera Utara sebesar 0,09 pada periode 2018-2020 dengan asumsi variabel lain dalam regresi linear berganda. Nilai koefisien belanja modal adalah sebesar 0,001 yang menunjukkan hasil positif. Hasil ini menunjukkan bahwa ketika terjadi setiap penambahan 1% variabel belanja modal dengan asumsi variabel lain tetap, maka akan menurunkan kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota provinsi Sumatera Utara sebesar 0,001 pada periode 2018-2020 dengan asumsi variabel lain dalam regresi linear berganda.

Berdasarkan Tabel 7. di atas, variabel pajak daerah memiliki t-hitung -0.895 dan nilai signifikan sebesar 0.373 > 0,05. Hal ini berarti variabel pajak daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota provinsi Sumatera Utara. Pajak daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota karena rendahnya porsi pajak daerah dalam pendapatan pemerintah daerah saat ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah terus melakukan manipulasi pajak daerah melalui pajak daerah sebagai peningkatan pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wiguna & Jati, 2019) yang menunjukkan bahwa pajak daerah pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah pada pemerintah daerah. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Syahputra et al., 2021) yang menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah



daerah. Banyaknya tuntutan dari masyarakat terhadap pemerintah daerah akan akuntabilitas penggunaan pajak daerah, maka hal tersebut menjadi sebuah acuan bagi pemerintah daerah untuk dapat memperbaiki kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.

Berdasarkan hasil pengujian statistik diperoleh nilai signifikan sebesar $0.000 < 0,05$ dengan memiliki t hitung -4.569 sehingga dapat dinyatakan pada penelitian ini bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Putri & Darmayanti, 2019) dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Priyono et al., 2020) menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Selain pendapatan daerah, dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah lainnya. Semakin besar dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka dapat menyebabkan lemahnya kemampuan keuangan dan kemandirian keuangan pemerintah daerah, karena daerah kurang memiliki kekuasaan dan kebebasan dalam penggunaan sumber-sumber pendapatan tersebut akibat ketergantungan yang tinggi dan tinggi. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa dana perimbangan yang semakin tinggi diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat akan menunjukkan tingkat kemandirian daerah yang semakin rendah atau menurun. Hal ini menunjukkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Tingkat kemandirian daerah yang rendah akan menunjukkan kinerja keuangan yang lemah atau kurang baik.

Berdasarkan hasil pengujian statistik diperoleh nilai signifikan sebesar $0.000 < 0,05$ dengan t -hitung sebesar 6.484 sehingga dapat dinyatakan pada penelitian ini bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (N. M. D. P. Sari & Mustanda, 2019) yang dimana pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan semakin tinggi pendapatan asli daerah yang dihasilkan maka akan semakin tinggi pula kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota, karena pendapatan asli daerah adalah sumber pendapatan bersih yang dapat dipilih oleh daerah, dimana daerah memiliki kewenangan dan kebebasan untuk mengelola dari sumber pendapatannya sendiri. Pendapatan PAD yang lebih tinggi memaksimalkan pembangunan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah, yang kemudian diterjemahkan menjadi hasil keuangan yang lebih baik untuk daerah. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa pendapatan asli daerah berupa pendapatan dari daerah itu sendiri dapat membantu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Karena dengan demikian pendapatan asli daerah merupakan sumber daya yang dapat digunakan sebagai bagian dari pembangunan daerah untuk mewujudkan kemandirian daerah dan otonomi daerah. Semakin tinggi pendapatan asli daerah, maka semakin baik kemampuan keuangan daerah tersebut.

Variabel belanja modal memiliki t -hitung -0.446 dan nilai signifikan sebesar $0.657 > 0,05$. Hal ini berarti variabel belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota. Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (N. M. D. P. Sari & Mustanda, 2019) yang mana belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi belanja modal yang dilakukan pemerintah maka semakin tinggi pula kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal yang seharusnya menggunakan dana kas daerah untuk menambah nilai tetap yang nantinya digunakan untuk pembangunan daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal yang mencerminkan kemampuan keuangan pemerintah. Ini adalah fakta bahwa adanya belanja modal pada aset tetap tidak serta merta mencerminkan bahwa belanja modal yang dapat menjadi cerminan kinerja keuangan yang baik justru dapat menjadi pemborosan. Dalam konteks lain, di mana belanja modal bertujuan untuk menguntungkan pembangunan daerah, menjadi sia-sia jika pemerintah kota berada di jalur yang salah dalam melaksanakan belanja modal, dalam hal ini manfaat dan dampaknya tidak dihasilkan di daerah, pembangunan ekonomi tidak akan berjalan baik. Belanja modal merupakan bagian dari kelompok pengeluaran daerah, yaitu pengeluaran yang dilakukan sehubungan dengan pembelian/akuisisi atau pembangunan aset tetap yang nilai pakainya lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam pemerintahan dan untuk kepentingan umum.

4. KESIMPULAN

Pajak daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wiguna & Jati, 2019) yang menunjukkan bahwa pajak daerah pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah pada pemerintah daerah. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Syahputra et al., 2021) yang menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Putri & Darmayanti, 2019) dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Priyono et al., 2020) menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota. Hasil penelitian ini sejalan dengan



penelitian yang dilakukan oleh (N. M. D. P. Sari & Mustanda, 2019) yang dimana pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota, karena pendapatan asli daerah adalah sumber pendapatan bersih yang dapat dipilih oleh daerah, dimana daerah memiliki kewenangan dan kebebasan untuk mengelola dari sumber pendapatannya sendiri. Belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota. Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (N. M. D. P. Sari & Mustanda, 2019) yang mana belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi belanja modal yang dilakukan pemerintah maka semakin tinggi pula kinerja keuangan pemerintah daerah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat bantuan, kerjasama dari berbagai pihak, khususnya para dosen dilingkungan Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan, yang telah memberikan masukan atas penyempurnaan dari tulisan ini, untuk itu peneliti mengucapkan banyak terima kasih.

REFERENCES

- Alfarisi. (2015). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negri Padang*.
- Budianto, B., & Alexander, S. W. (2016). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 4(4), 844–851.
- Fitriyanti, N. (2022). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Journal of Economics and Business*. Vol. 4, No. 1.
- Heryanti, C. D., Wahidahwati, W., & Suryono, B. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(1). <https://doi.org/10.25139/jaap.v3i1.1721>
- Honoatubun, S. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *EduPsyCouns Journal*. 2 (1):151.
- Juwita, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 8(September), 22–47.
- Lathifa, H., & Haryanto. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 8, No. 2.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Ed 1). Andi.
- Nasution, D., Aditia Darma, E., & Muda, I. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita* 5(2).
- Nauw, E. T. (2021). Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–17.
- Priyono, N., Fatimah, A., & Nurcahya, Y. (2020). Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Jawa Tengah. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 5(2), 212–225. <https://doi.org/10.31002/rep.v5i2.2202>
- Putri, N. K. N. I., & Darmayanti, N. P. A. (2019). Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(5), 2834. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i05.p09>
- Saragih, F. (2020). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing. *Seminar Of Social Sciences Engineering & Humaniora E-ISSN 2775-4049 SCENARIO 2020*.
- Sari, I. P., & Agusti, R. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kab/kota Pulau Sumatra). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 679–692.
- Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(8), 4759. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i08.p02>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet.
- Syahputra, O., Hutagalung, G., & Pakpahan, E. (2021). The Impact of Local Taxes, Regional Retributions, and Other Legitimate Original Local Government Revenues on The Financial Performance of Local Government With Economic Growth as a Moderating Variable in The Government of North Sumatera Province. *International Journal of Business, Economics and Law (IJBEL)*, 24(3), 107–115.
- Verawaty, Ade, K. J. Intan, P., & Nurhidayah. (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *MBIA*. Vol. 19, No. 1.
- Wiguna, K. A., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang Sah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 85–108.